

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Namun bedanya, di negara maju pengangguran dijamin oleh negara, sedangkan di negara berkembang tidak demikian. Pengangguran sebagai permasalahan yang mempunyai dampak negatif terhadap perekonomian dan masyarakat.

Menurut Bangun (2023), pengangguran identik dengan tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja, pengangguran bisa disebabkan karena ketidakmerataan antara jumlah pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja yang bertambah setiap tahunnya. Saat ini persaingan di dunia kerja sudah semakin ketat, seringkali lulusan baru disandingkan dengan orang yang sudah berpengalaman, ini juga menjadi gejala yang baru dalam ketidakmerataan tersebut sudah terjadi, apalagi saat ini teknologi digital yang semakin canggih, jiwa-jiwa yang berada pada umur produktif dituntut giat dalam akselerasi dunia pekerjaan, menjadi pelaku aktif dan kreatif dalam berinovasi.

Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja perekonomian suatu daerah. Fenomena pengangguran di Sumatera Utara dari tahun 2019 hingga 2023 menarik untuk dikaji lebih mendalam, mengingat Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan populasi yang besar di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara tercatat sebesar 5,4% pada tahun 2019. Kemudian, angka ini semakin meningkat menjadi 6,91% di tahun 2020, yang diduga dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berkurangnya lapangan pekerjaan baru.

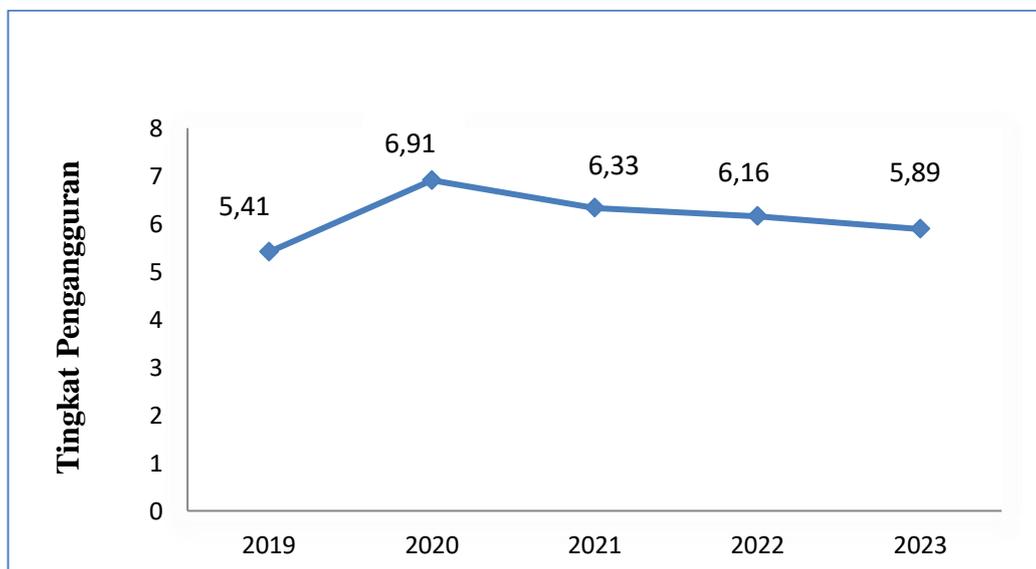
Menurut Yetty (2019), Maraknya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) saat ini meresahkan berbagai golongan, baik dari sisi perusahaan maupun dari kaum buruh. Fenomena pengangguran ini perlu untuk dilakukan penelitian dan juga analisa, karena dengan adanya pengangguran yang merupakan masalah pokok yang dapat menimbulkan gejolak sosial dan politik yang akan mengganggu kestabilan perekonomian suatu negara. Pengangguran mampu menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang di indikasikan dengan menurunnya daya beli masyarakat dikarenakan tidak memiliki penghasilan sehingga tidak mampu melakukan aktivitas konsumsi. Mengurangi tingkat pengangguran bukanlah hal yang mudah, beberapa program pemerintah yang direncanakan dapat menanggulangi pengangguran belum bisa diwujudkan sesuai dengan saran, sehingga pengangguran menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah daerah Sumatera Utara terus berupaya untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menyediakan pelatihan keterampilan bagi para pencari kerja (Fitri, 2022). Dalam satu studi yang dilakukan, disebutkan bahwa pemerintah Indonesia secara keseluruhan telah berusaha untuk mengelolah masalah pengangguran dan kemiskinan melalui berbagai program dan kebijakan, seperti pengembangan Usaha Kecil Menengah

(UKM), penyediaan jaminan sosial, hingga insentif untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam menekan angka pengangguran di Sumatera Utara, khususnya pada beberapa sektor seperti industri manufaktur dan jasa yang terkena dampak perlambatan ekonomi. Contohnya, pada tahun 2023, beberapa industri manufaktur di Sumatera Utara, seperti tekstil dan elektronik, mengalami penurunan produksi dan PHK karyawan akibat perlambatan ekonomi global.

Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai tren pengangguran di Sumatera Utara selama periode 2019-2023 sangat diperlukan untuk memahami dinamika dan kompleksitas permasalahan ini, sehingga dapat disusun kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Tingkat Pengangguran di Sumatera Utara pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: BPS Sumatera Utara, 2023

**Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran di Provinsi di Sumatera Utara
2019-2023 (Persen)**

Berdasarkan gambar 1.1 di atas dapat dilihat fluktuasi tingkat pengangguran di provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 sampai 2023. Perkembangan tingkat pengangguran di Sumatera Utara pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan, tingkat pengangguran sebesar 5,41% pada tahun 2019, lalu meningkat sebesar 6,91% pada tahun 2020. Menurut (Isnayanti & Ritonga, 2017) fenomena tersebut terjadi karena peningkatan jumlah penduduk lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tersedia ataupun tingginya kriteria rekrutmen penawaran kesempatan kerja yang ada. Pendapat lain Badan Pusat Statistik Sumatera Utara faktor penyebab tingginya pengangguran pada tahun tersebut karena pandemi COVID-19 menyebabkan krisis ekonomi global yang berdampak pada kondisi sosial dan aktivitas usaha. Hal ini memicu PHK massal di berbagai sektor khususnya ekonomi.

Perkembangan tingkat pengangguran pada tahun 2021-2023 di Sumatera Utara mengalami penurunan, pada tahun 2021 tingkat pengangguran sekitar 6,33%, pada tahun 2022 sebesar 6,16% dan kembali menurun pada tahun 2023 sebesar 5,89%. Relatif rendahnya tingkat pengangguran tersebut seiring membaiknya kondisi pandemi serta pengendalian inflasi dan penciptaan lapangan kerja sehingga aktivitas perekonomian di Sumatera Utara mulai pulih. Hal ini mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja di berbagai sektor, seperti manufaktur, perdagangan, dan pariwisata.

Permasalahan pengangguran memang sangat kompleks untuk dibahas dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator.

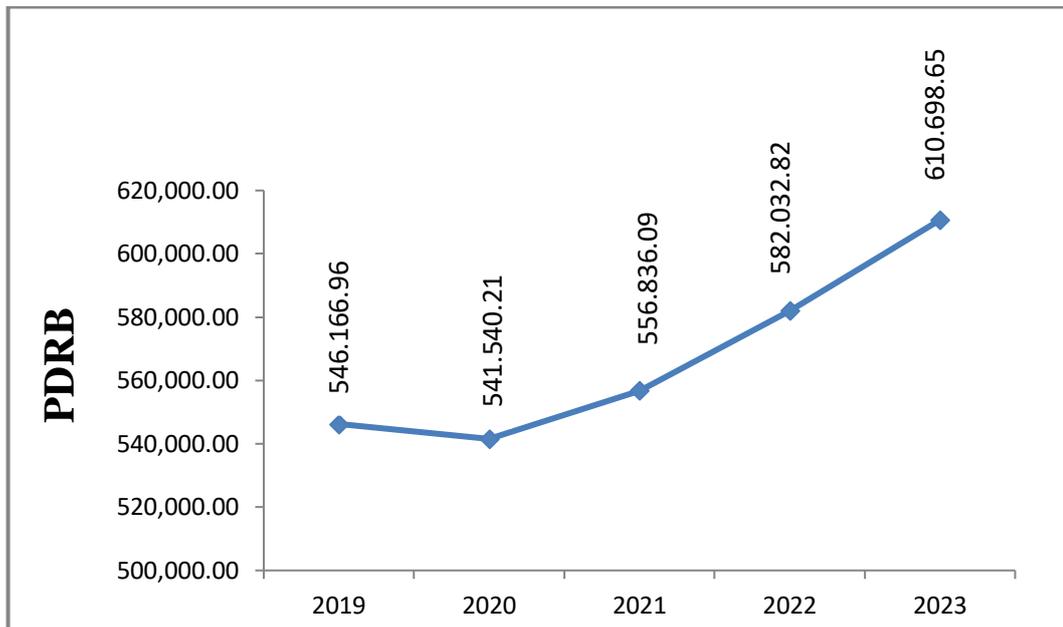
Indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran antara lain PDRB, belanja daerah, serta upah minimum yang berlaku.

Menurut Siregar (2023) salah satu pendorong utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pada dasarnya merupakan dasar nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produk harus sama dengan nilai barang yang digunakan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan pada periode saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dihitung menggunakan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Dalam periode 2019-2023, Sumatera Utara mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan (Udin *et al.*, 2018). Hal ini terlihat dari Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara adalah sektor industri. Pada sektor industri, terdapat pertumbuhan yang pesat dalam beberapa subsektor seperti tekstil, makanan olahan, minyak sawit, dan pariwisata. Faktor lain yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara adalah investasi yang masuk ke daerah ini. Investasi ini melibatkan berbagai sektor seperti industri, infrastruktur, dan pariwisata (Noor & Saputra, 2020). Namun, meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, Sumatera Utara juga menghadapi beberapa tantangan dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah ini. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah rendahnya ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang sesuai dengan

tuntutan pasar kerja saat ini (Romarina, 2016). Tantangan lainnya adalah infrastruktur yang belum optimal, terutama dalam hal konektivitas dan transportasi.

Meningkatnya produksi berarti PDRB terus meningkat, dan tentu saja pasar menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga pengangguran pun turun. Sebaliknya jika produk domestik bruto suatu daerah menurun, yaitu jika volume produksi atau nilai tambah suatu barang dan jasa di suatu daerah menurun, maka dengan sendirinya permintaan tenaga kerja akan menurun. Akan tetapi hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat pengangguran di Sumatera Utara selama periode 2019-2023 menunjukkan hubungan yang kompleks dan tidak selalu searah. Hal ini dikarenakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, misalnya pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antar sektor dapat mempelebar kesenjangan pendapatan dan memicu pengangguran terselubung, selain itu keterampilan angkatan kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dapat menyebabkan kesulitan dalam mencari pekerjaan meskipun PDRB meningkat, dan berbagai faktor lainnya. Berikut ini data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 :



Sumber: BPS Sumatera Utara, 2023

Gambar 1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Konstan Tahun 2010 di Provinsi di Sumatera Utara 2019-2023 (Rupiah)

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas terlihat perkembangan Produk Domestik regional Bruto (PDRB) di Sumatera Utara pada tahun 2019 sampai 2023. Produk Domestik Regional Bruto pada periode 2019 sampai 2020 cenderung menurun, pada tahun 2019 PDRB mencapai Rp 541.166.96,- dan Rp 541.504.21,- pada tahun 2020. Pada tahun tersebut pandemi COVID-19 yang melanda global pada awal tahun 2020 membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor di Sumatera Utara. Dalam pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 menyebabkan penutupan beberapa sektor usaha, seperti pariwisata, restoran, dan transportasi, yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi. Pendapat lain, menurut (Arizal, 2019) apabila PDRB suatu daerah tertentu mengalami penurunan, maka produksinya juga akan

turun artinya tingkat output atau produksi yang ada di daerah tersebut akan turun karena konsumsi masyarakat turun dan juga tenaga kerja yang digunakan turun akibatnya berkurangnya produksi perusahaan yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran.

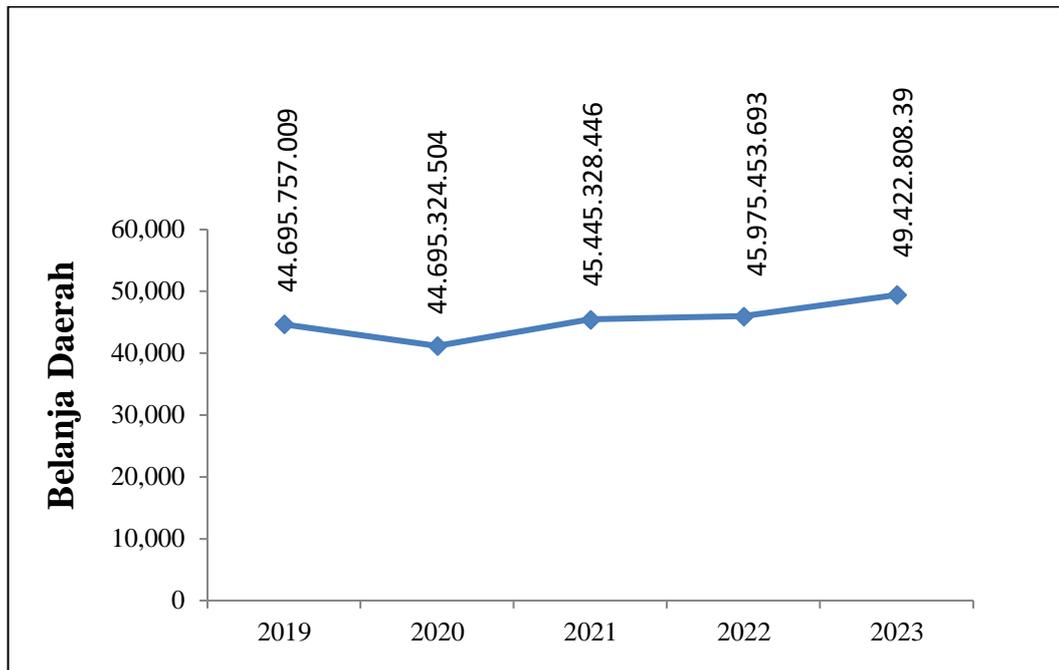
Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto secara signifikan terjadi pada periode 2021 sampai 2023. Pada tahun 2021 PDRB mencapai sebesar Rp 556.836.09,- kemudian PDRB meningkat pada tahun 2022 sebesar Rp 582.032.82,- dan sebesar Rp 610.698.65,- PDRB pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19, menurut (Sari, 2021), peningkatan tersebut dipengaruhi oleh sektor industri, khususnya subsektor industri pengolahan non migas (manufaktur). Selain itu, juga karena adanya peningkatan daya beli masyarakat yang mendorong konsumsi rumah tangga, terutama untuk barang dan jasa. Jika dikaitkan dengan tingkat pengangguran Sumatera Utara justru mengalami penurunan pada tahun 2021-2023, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fikri & Anis, 2023) berarti jika PDRB meningkat maka tingkat pengangguran akan menurun.

Belanja daerah memiliki potensi untuk mempengaruhi kondisi ekonomi suatu daerah, termasuk tingkat pengangguran. Belanja daerah merupakan bagian penting dari kebijakan fiskal pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam dan potensi ekonomi yang cukup besar. Pemerintah daerah Sumatera

Utara telah mengalokasikan anggaran belanja yang signifikan untuk pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Upaya dalam meningkatkan pendapatan dan sumber daya daerah diharapkan dapat mengamankan dana untuk melaksanakan pembangunan, dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Pendapatan daerah terutama digunakan untuk mendanai sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Semakin banyak pendapatan yang dimiliki suatu daerah, maka semakin banyak dana yang dapat digunakan untuk pembelian, begitu pula sebaliknya, semakin banyak pula dana yang tersedia untuk pembiayaan pembangunan.

Belanja daerah digunakan untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat lokal dan mendorong peningkatan kegiatan lokal. Peningkatan aktivitas ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pada gilirannya meningkatkan sumber daya keuangan daerah. Berikut ini adalah data perkembangan belanja daerah di Sumatera Utara pada tahun 2019-2023:



Sumber: BPS Sumatera Utara, 2023

**Gambar 1.3 Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
(Rupiah)**

Berdasarkan Gambar 1.3 di atas dapat dilihat fluktuasi belanja daerah Sumatera Utara pada tahun 2019-2023. Perkembangan belanja daerah pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan. Pada tahun 2019 belanja daerah mencapai Rp 44.695.757.009 dan menurun pada tahun 2020 sebesar Rp 44.695.324.504. Menurunnya belanja daerah tersebut dikarenakan pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, sehingga berdampak negatif pada penerimaan pajak dan retribusi daerah serta banyak proyek infrastruktur dan program tertunda atau dibatalkan karena refocusing anggaran dan kebijakan sosial.

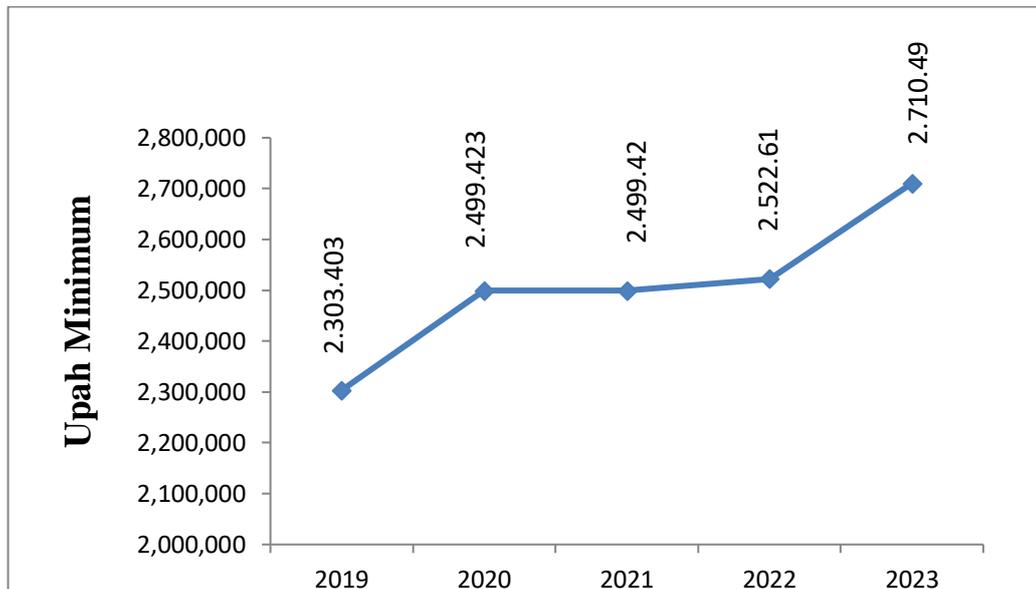
Setelah itu pada tahun 2021 hingga 2023 belanja daerah mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 belanja daerah mencapai Rp 45.445.328.446 dan meningkat sebesar Rp 45.975.453.693 pada tahun 2022. Kemudian meningkat kembali sebesar Rp 49.422.808.39 pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya pemulihan perekonomian pasca pandemi COVID-19 mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, sehingga berdampak positif pada penerimaan pajak dan retribusi daerah serta peningkatan kebutuhan dan permintaan masyarakat akan layanan publik. Jika dikaitkan dengan tingkat pengangguran di Sumatera Utara justru mengalami penurunan pada tahun 2021-2023, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Naza *et al.*, 2020) yang berarti belanja daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Namun, berbeda pada penelitian (Huda & Karsudjono, 2021) dengan hasil penelitiannya bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran.

Permasalahan utama selanjutnya dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara adalah masalah upah yang rendah dan secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada tidak pengangguran yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena penambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya.

Menetapkan tingkat upah merupakan tanggung jawab pemerintah dan mempengaruhi tingkat pengangguran lokal. Semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan pemerintah, maka semakin sedikit pekerja yang bekerja (Farid, 2007).

Penentuan tingkat upah dipengaruhi oleh kondisi perekonomian setempat, yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Artinya semakin baik keadaan perekonomian suatu daerah, maka semakin besar pula pertumbuhan ekonomi atau PDRB daerah tersebut, dan semakin tinggi pula penentuan tingkat upah.

Pada periode 2019-2023, upah minimum di Sumatera Utara mengalami peningkatan yang stabil, yang mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa para pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pemerintah tetap yakin bahwa upah minimum merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja berpenghasilan rendah. Indonesia tidak akan bisa mengandalkan mekanisme pasar untuk menentukan upah pekerja, karena ketidakseimbangan struktural masih terlihat di pasar tenaga kerja. Peningkatan tingkat upah diiringi dengan penurunan permintaan tenaga kerja sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran (Amrullah *et al.*, 2019). Berikut perkembangan upah minimum di Sumatera Utara pada tahun 2019-2023:



Sumber: BPS Sumatera Utara, 2023

Gambar 1.4 Upah Minimum Di Sumatera Utara Tahun 2019-2023

(Rupiah)

Berdasarkan pada gambar 1.4 di atas dapat dilihat perkembangan upah minimum di Sumatera Utara dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan secara umum. Secara nominal, upah minimum Sumatera Utara meningkat dari Rp.2.303.403 pada tahun 2019 menjadi Rp2.710.493 pada tahun 2023. Menurut (Fikri & Anis, 2023) peningkatan upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja yang berakibat pada tingginya pengangguran. Penurunan tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau *scale effect*, penurunan tenaga kerja dibutuhkan karena adanya pergantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut efek substitusi.

Berdasarkan media Tribun-Medan, kenaikan upah minimum setiap tahunnya yaitu sebesar kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi 2019 menjadi acuan kenaikan upah minimum pada tahun 2020, berdasarkan perhitungan kenaikan upah minimum di Indonesia adalah 8,51 persen. Kenaikan upah minimum nasional kemudian dirujuk menjadi kenaikan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota. Jika dikaitkan dengan tingkat pengangguran Sumatera Utara juga mengalami peningkatan dari tahun 2020-2022 yang berarti peningkatan upah minimum diikuti oleh peningkatan tingkat pengangguran, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yetty *et al.*, 2019) yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Penentuan tingkat upah dipengaruhi oleh kondisi perekonomian setempat, yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Artinya semakin baik keadaan perekonomian suatu daerah, maka semakin besar pula pertumbuhan ekonomi atau PDRB daerah tersebut, dan semakin tinggi pula penentuan tingkat upah.

Pengangguran merupakan salah satu tolak ukur ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif timbul akibat meningkatnya pengangguran. Pengangguran yang ada di Provinsi Sumatera Utara hingga tahun 2023 menunjukkan jumlah penduduk yang tergolong penganggur masih cukup tinggi yaitu mencapai 6,16%. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum maksimalnya kebijakan pemerintah Sumatera Utara dalam menanggulangi masalah pengangguran. Diharapkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat

pengangguran seperti PDRB, belanja daerah dan upah minimum dapat meminimalisir tingkat pengangguran yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara.

Sejauh ini telah banyak yang meneliti mengenai tingkat pengangguran yang berkaitan dengan PDRB, belanja daerah dan upah minimum. Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Sari (2016) hasil penelitiannya menunjukkan PDRB berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Sedangkan pada penelitian M, Arizal (2019) PDRB tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Hasil penelitian Naza *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hasil penelitian Amrullah & Istiyani (2019) menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan pada penelitian Yetty *et al.*, (2019) upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas dan terdapat research gap yang hasilnya masih kontradiktif, membuat penulis tertarik meneliti mengenai “Pengaruh PDRB, Belanja Daerah Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Sumatera Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat disimpulkan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Pengangguran di Sumatera Utara?

2. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah terhadap Tingkat Pengangguran di Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran di Sumatera Utara?
4. Bagaimana pengaruh PDRB, Belanja Daerah, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran di Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk :

1. Mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Sumatera Utara.
2. Mengetahui pengaruh Belanja Daerah Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Sumatera Utara.
3. Mengetahui pengaruh Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara.
4. Mengetahui pengaruh PDRB, Belanja Daerah, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi ilmu pengetahuan, menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu ekonomi khususnya ilmu ekonomi regional terkait dengan Pengaruh PDRB, Belanja Daerah Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Sumatera Utara.
2. Bagi penelitian-penelitian berikutnya, dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk dikembangkan lebih lanjut mengenai Pengaruh PDRB, Belanja Daerah Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Sumatera Utara.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai Pengaruh PDRB, Belanja Daerah Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Sumatera Utara.
2. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat menjadi masukan dalam membuat kebijakan mengenai Pengaruh PDRB, Belanja Daerah Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Sumatera Utara.